

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KETEPATANWAKTU PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

ELFINA AMERIA
NPM : 2002110096



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
TAHUN 2024/2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 17 Januari 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ELFINA AMERIA
NPM : 2002110096

Dengan judul:

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KETEPATANWAKTU PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

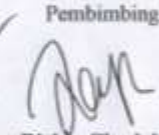
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing II


Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Des. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 17 Januari 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ELFINA AMERIA
NPM : 2002110096

Dengan judul:

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KETEPATANWAKTU PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE)**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 06 Januari 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001

Anggota

Elvira, S.E., M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 17 Januari 2024

Yang Menyatakan



Elfina Ameria

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.WB

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas segala rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan daerah Terhadap Ketepatanwaktu pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Alm. Rasanadin dan Alm. Jayani yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.

2. Bapak Drs.Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
3. Ibu Hj.Nadiya, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
4. Bapak H.Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
5. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si., selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
6. Bapak H.Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA., dan Ibu Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
7. Kepada kakak Lely Monika dan kakak Fomi Andelas yang telah mendukung, mengawasi dan mendorong penulis serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat berubah jauh lebih baik dari sebelumnya.
8. Kepada Khairil Ramadhan selaku best patner penulis.
9. Dan kepada teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Penulis

Elfina Ameria

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Praktis	5
1.4.2 Kegunaan Akademis	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 7
2.1 Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	7
2.1.1 Peranan Pelaporan Keuangan	8
2.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan.....	8
2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	9
2.2.1 Peran Pemanfaatan Teknologi Informasi	10
2.2.2 Asas-Asas Teknologi Informasi	11
2.3 Pengawasan Keuangan Daerah.....	11
2.3.1 Jenis-Jenis Pengawasan Keuangan Daerah	13
2.4 Penelitian Sebelumnya	13
2.5 Kerangka Pemikiran	17
2.5.1 Hubungan Pemanfaatan teknologi informasi dengan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan	17
2.5.2 Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah dengan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Daerah.....	17
2.6 Hipotesis	19
 BAB III METODE PENELITIAN	 20
3.1 Desain Penelitian	20
3.1.1 Sifat Studi	20
3.1.2 Jenis Investigasi.....	21
3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi	21
3.1.4 Situasi Studi	21
3.1.5 Unit Analisis	22
3.1.6 Horizon Waktu	22

3.2 Populasi dan Sampel.....	22
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Definisi Operasional Variabel	25
3.4.1 Variabel Dependen (Y) Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	25
3.4.2 Variabel Independent.....	25
3.4.2.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	25
3.4.2.2 Pengawasan Keuangan Daerah	26
3.5 Teknik Analisis Data	27
3.5.1 Statistik Deskriptif	28
3.5.2 Regresi Linier Berganda	28
3.6 Pengujian Data.....	28
3.6.1 Pengujian Instrumen	28
3.6.1.1 Pengujian Validitas	29
3.6.1.2 Pengujian Reliabilitas	29
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	30
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	30
3.6.2.2 Pengujian Multikolinieritas.....	30
3.6.2.3 Pengujian Heteroskedastisitas.....	31
3.6.2.4 Pengujian Autokorelasi.....	31
3.7 Pengujian Hipotesis	32
3.7.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F)	32
3.7.2 Pengujian Secara Parsial (Uji T)	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.2 Karakteristik Responden	35
4.2.1 Distribusi Jawaban Responden Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	37
4.2.2 Distribusi Jawaban Responden Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	38
4.2.3 Distribusi Jawaban Responden Pengawasan Keuangan Daerah.....	39
4.3 Statistik Deskriptif.....	41
4.4 Regresi Linier Berganda.....	42
4.5 Hasil Pengujian Data	43
4.5.1 Pengujian Validitas Instrumen.....	43
4.5.2 Uji Reliabilitas	44
4.6 Pengujian Asumsi Klasik	45
4.6.1 Uji Normalitas	45
4.6.2 Uji Multikolinieritas	46
4.6.3 Uji Heteroskedastisitas	47
4.6.4 Uji Autokorelasi	48
4.7 Hasil Pengujian Hipotesis.....	48
4.7.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	48
4.7.2 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji T)	49

4.8 Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	23
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	26
Tabel 3.3 Skala Likert	29
Tabel 4.1 Deskriptif Kuesioner	34
Tabel 4.2 Karakteristik Responden	35
Tabel 4.3 Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	36
Tabel 4.4 Distribusi Jawaban Responden terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi	38
Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah	39
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	41
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda	42
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas	43
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Reliabilitas	44
Tabel 4.10 Nilai VIF Variabel Bebas.....	46
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Secara Simultan	48
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi.....	49
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Seacara Parsial (Uji T).....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	18
Gambar 4.1 Hasil Pengujian Normalitas	45
Gambar 4.2 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	47

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	60
Lampiran 2 Tabel Tabulasi Responden	64
Lampiran 3 Statistik Deskriptif.....	67
Lampiran 4 Hasil Regresi Linier Berganda	68
Lampiran 5 Uji Validitas dan Relibialitas KPK.....	71
Lampiran 6 Uji Validitas dan Reliabilitas PTI.....	72
Lampiran 7 Uji Validitas dan Reliabilitas PKD.....	73

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KETEPATANWAKTU PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Simeulue)**

**ELFINA AMERIA
2002110096**

Pembimbing I : H.Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA.
Pembimbing II : Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan satuan pengukuran skala likert. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah regresi linier berganda dan untuk pengujian hipotesis digunakan uji-F dan uji-t dengan bantuan program SPSS versi 20. Hasil uji-F (simultan) menunjukkan bahwa variabel yang diteliti yaitu Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasana keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai F_{hitung} sebesar 17,363 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,13 dengan taraf signifikansi 0,000 pada tingkat signifikan 5%.

Kata kunci: *pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah*

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KETEPATANWAKTU PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Simeulue)**

**ELFINA AMERIA
2002110096**

**Pembimbing I : H.Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA.
Pembimbing II : Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si.**

ABSTRACT

The research aims to determine the simultaneous and partial influence of the use of information technology and regional financial supervision on the timeliness of financial reporting of the regional government of Simeulue Regency. This research was conducted at the Simeulue Regency Regional Work Unit (SKPD). The total population in this study was 70 respondents. Data was collected using a questionnaire with Likert scale measurement units. The analytical technique used in analyzing the data is multiple linear regression and for hypothesis testing the F-test and t-test are used with the help of the SPSS version 20 program. The results of the F-test (simultaneous) show that the variables studied are the use of information technology and regional financial supervision. simultaneously influences the timeliness of local government financial reporting with an Fcount value of 17.363 and an Ftable value of 3.13 with a significance level of 0.000 at a significance level of 5%.

Keywords: *pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Mengkaji pelaporan keuangan pemerintah merupakan suatu hal yang sangat menarik, dikarenakan tuntutan terhadap akuntabilitas lembaga publik semakin menguat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Semakin besar tuntutan terhadap akuntabilitas publik maka akan menimbulkan sebuah implikasi bagi pihak manajemen pemerintahan dalam memberikan sebuah informasi yang lebih baik terhadap publik (Putri, 2020). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan *disclosure* serta ketepatanwaktu atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal, suatu instansi memiliki tata kelola yang baik sehingga kinerja yang dihasilkan mempunyai banyak manfaat untuk instansi tersebut. Dalam suatu instansi pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pertanggung jawaban sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan kinerja yang baik, pemimpin dalam instansi tersebut harus bisa mengambil keputusan yang baik sehingga dapat dituangkan dalam bentuk program kerja untuk mensejahterahkan masyarakat (Pratiwi, 2022).

Laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih berguna dari pada yang tidak tepat waktu. Ketepatanwaktu merupakan salah satu faktor penting dalam

menyajikan suatu informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Informasi laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu atau sesegera mungkin agar keputusan-keputusan ekonomi dapat segera diambil dan untuk menghindari hilangnya relevansi informasi yang terdapat didalamnya. Keberhasilan suatu sistem dalam suatu perusahaan atau instansi berkaitan erat dengan baik buruknya kinerja yang dimiliki para pegawai (De Romero, 2023).

Ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi ketepatanwaktu pelaporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah kinerja kerja pegawai dalam suatu instansi dan memungkinkan berbagai pekerjaan dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi penggunaan komputer, jaringan internet dilakukan secara komputerisasi dan penggunaan software sesuai dengan undang-undang dalam mengelola data sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. (Ardianto, 2019).

Faktor selanjutnya yang berpotensi mempengaruhi kredibilitas dalam ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah merupakan usaha terstruktur guna menentukan capaian kerja dan standar terkait adalah pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, evaluasi kegiatan, pencatatan transaksi berdasarkan bukti, sistem pengawasan pelaksanaan tugas, pencatatan transaksi berdasarkan waktu dan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) demi memberi

jaminan bila sumber daya organisasi sudah dimanfaatkan secara efektif (Ukkas, 2022).

Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam dan lebih lanjut, karena pada kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) wilayah Aceh, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial tidak sesuai ketentuan, penyelesaian 19 paket pekerjaan pada tiga SKPD terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal, serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pemerintah belum seutuhnya memanfaatkan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dengan benar sesuai peraturan sebagai perwujudan dan komitmen untuk pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan dan transparansi sehingga sangat berdampak pada laporan keuangan yang berkualitas di pemerintahan Kabupaten Simeulue. Efektifitas kepala daerah dalam menindaklanjuti serta menciptakan dan memelihara suatu proses dalam pemanfaatan teknologi informasi serta pengawasan keuangan daerah sangat penting agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditentukan, serta dapat memberikan manfaat stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan (BPK Aceh, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif judul:

“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Simeulue)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.
3. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan pemerintah daerah akan memperoleh sumbangan pemikiran tentang pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Manfaat akademis yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi penelitian selanjutnya serta dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan untuk memahami hubungan pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan laporan keuangan pemerintah.
3. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, manfaat penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ketepatanwaktu merupakan batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi sekarang di tangan pemakai. Hal ini mencerminkan betapa ketepatanwaktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian laporan keuangan kepada publik sehingga pemerintah diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangannya agar informasi tersebut tidak kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (Suartini, 2023).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan tersebut dilaporkan dalam satu periode akuntansi. Penyusunan serta penyajian LKPD wajib berlandaskan standar atau ketentuan akuntansi yang telah dibuat oleh pemerintah atau Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah juga harus memenuhi ciri-ciri kualitatif meliputi relevansi, keandalan, bisa dikomparasikan, serta dapat dimengerti. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan wajib mempunyai manfaat umpan balik, tepat waktu, prediktif, serta lengkap supaya relevansi dapat tercapai.

2.1.1 Peranan Pelaporan Keuangan

Peran laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan terutama untuk mengetahui nilai sumberdaya ekonomi yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, penilaian kondisi keuangan, dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan memiliki keharusan untuk melaporkan secara sistematis dan terstruktur terkait upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kerja (Priyambodo, 2022).

2.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Effendi (2021) pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi untuk mengelola data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Sumber daya manusia harus memahami teknologi informasi terkait pedoman pelaporan serta komponen yang ada dalam sistem informasi akuntansi pemerintah (Hasyim, 2023). Undang-Undang republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik harus lebih transparan, bertanggung jawab, dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat serta pejabat publik dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam keterbukaan informasi dapat menggunakan sarana atau media elektronik dan nonelektronik.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip good governance, pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan menyalurkan informasi kepada publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan dan akses terhadap informasi keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat (Sitepu, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa apabila karyawan dapat memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan tugas mereka dengan baik, maka teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan jauh lebih optimal (Soufitri, 2022).

2.2.1 Peran Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki manfaat yang luar biasa besar, terutama bagi pemerintah. Dengan menggunakan teknologi informasi pemerintah dapat menyediakan, mengelola dan melaporkan keuangan dengan mudah, cepat dan akurat (Nugraha, 2023).

Menurut Widagdo (2021) peranan teknologi informasi pada bidang pemerintahan antara lain:

1. Pemberdayaan pada masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
2. Informasi yang disediakan 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu kantor dibuka atau harus mencari alamat kantor tersebut.
3. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien dan baik.
4. Tuntutan publik saat ini mendesak pemerintah untuk terus mengembangkan sistem informasi demi keterbukaan dan informasi yang valid. Untuk mengatasi paradigma baru, pemerintah harus mengikuti perkembangan zaman.

Dengan hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi penghalang bagi masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah, sehingga pelaksanaan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien. Dari manfaat yang didapatkan, pemanfaatan teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu penyelenggara.

2.2.2. Asas-Asas Teknologi Informasi

Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 mengatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
2. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
4. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

2.3 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 pasal 1 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan dalam tujuan yang akan dicapai.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2019, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana negara dianalogikan dengan daerah.

Menurut Mahulae (2022) pengawasan keuangan daerah adalah sebagai sesuatu upaya sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan atau rencana serta

intruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui atau tidak sulitnya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektifitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

2.3.2 Jenis-Jenis Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Rifai, (2020) pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

1. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan atau pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat.
2. Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini Indonesia adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
4. Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan De Romario (2023) yang berjudul pengaruh kinerja pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dengan menggunakan metode penelitian primer dan analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kedua variabel bebas tersebut mempunyai hubungan erat dimana kinerja pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan pengelolaan keuangan di instansi tersebut, serta semakin baik juga ketepatan waktu pelaporan keuangannya.

Penelitian yang dilakukan Damanik (2022) yang berjudul pengaruh penatausahaan aset dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan metode penelitian primer, analisis yang digunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap dan pemanfaatan teknologi informasi mendorong ketepatan waktu laporan keuangan SOPD yang disajikan sehingga dapat mendorong tercapainya kepentingan prinsipal dan terhindarnya dari konflik antara agen dan prinsipal.

Penelitian yang dilakukan Ukas (2021) yang berjudul pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah

daerah, dengan menggunakan metode primer, analisis yang digunakan hipotesis metodologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal maupun pengawasan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Maharani (2021) yang berjudul pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah nagari Kabupaten Tanah Datar, dengan menggunakan metode penelitian primer, analisis yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah nagari, sedangkan sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah nagari.

Penelitian yang dilakukan Afriani (2021) yang berjudul pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dengan menggunakan metode penelitian primer, analisis yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan	
				Persamaan	Pebedaan

1	Pengaruh kinerja pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. De Romario, Tahun (2023)	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh staf yang berasal dari divisi akuntansi, aset, dan bagian sekertaris. Metode analisisnya yaitu regresi berganda.	Kinerja pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.	Pemanfaatan teknologi informasi, ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.	Pengawasan keuangan daerah, kinerja pegawai.
2	Pengaruh penatausahaan aset dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara. Damanik, Tahun (2020).	Populasi penelitian ini adalah seluruh SOPD Kabupaten Barito Utara. Analisis yang digunakan regresi logistik.	Penatausahaan aset dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.	Pemanfaatan teknologi informasi, ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.	Penatausahaan aset, pengawasan keuangan daerah.

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan	
				Persamaan	Pebedaan
3	Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ukkas, Tahun (2021)	Prosedur menuliskan artikel ini ialah mempergunakan prosedur kualitatif dan kajian pustaka. Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring di perpustakaan maupun daring yang diperoleh melalui Mendeley, Scholar Google maupun media daring lain.	Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal maupun pengawasan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial bagi ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah.	Pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan.	Pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah.

4.	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. Maharani, Tahun (2021).	Populasi dalam penelitian ini yaitu pada pemerintah nagari di kabupaten Tanah Datar. Metode analisis yang digunakan adalah yaitu regresi linier berganda.	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari, sedangkan sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah nagari.	Pemanfaatan teknologi informasi, ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.	kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pengawasan keuangan daerah.
5.	Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Afriani, Tahun (2021).	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda	pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan berdampak positif terhadap ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah	Pemanfaatan teknologi informasi, Pengawasan keuangan daerah dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.	Pengendalian internal, dan Penggunaan teknologi informasi,

2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Hubungan Pemanfaatan teknologi informasi dengan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan

Informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktu) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Selain itu, manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan

pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing* (Isnayanti, 2022).

Untuk hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan pemerintah daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh De Romario (2023) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2021) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah nagari.

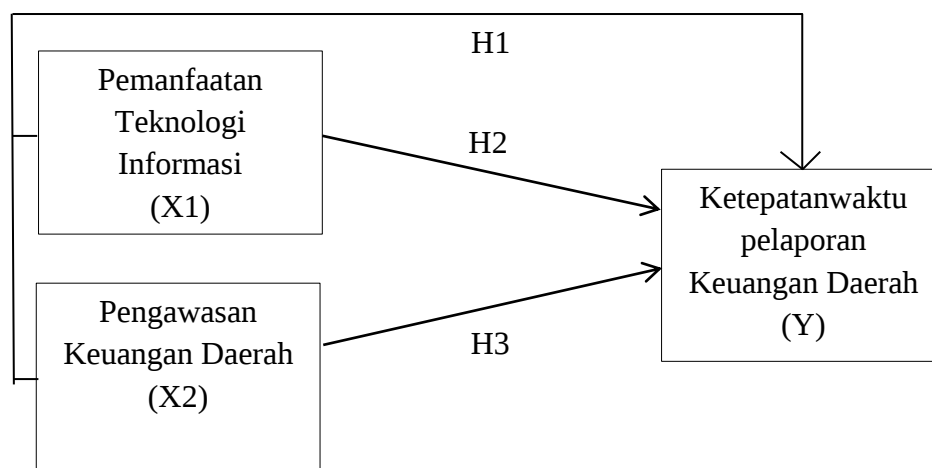
2.5.2 Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah dengan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Daerah

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan pemerintah daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan Afriani (2021) tentang pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan yang menunjukkan bahwa Pengawasan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial pada ketepatanwaktu melaporkan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori–teori yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, model penelitian ini adalah satu arah yaitu menjelaskan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif (H_a) sebagai berikut:

- H_1 : Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.
- H_2 : Pemanfaatan teknologi secara parsial berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.
- H_3 : Pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, artinya penelitian ini memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya (Pelamonia, 2021).

Desain penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi. Masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah, variabel terikat yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3.1.2 Jenis Investigasi

Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ini ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi, pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen berpotensi dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel independen.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi

Tingkat intervensi adalah tingkat keterlibatan, peneliti ingin melihat seberapa terlibatnya peneliti dengan penelitiannya tersebut. Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti tidak ikut mempengaruhi kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tingkat intervensi peneliti rendah. Peneliti hanya mengumpulkan data berupa kuesioner yang diisi responden, dan selanjutnya menganalisis data tersebut.

3.1.4 Situasi Studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Peneliti ingin mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah tanpa adanya intervensi terhadap sumber data di lapangan. Oleh karena itu, situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data di lapangan.

3.1.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue secara individu. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kuesioner.

3.1.6 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *cross sectional* studi *cross sectional* yaitu studi yang mengumpulkan data hanya sekali periode, baik harian, mingguan, bulanan, maupun data tahunan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan waktu tertentu dalam rangka menjawab kuesioner yang diberikan kepada responden.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue yang berjumlah 35 SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan staf akuntansi pada masing-masing SKPD. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diberikan 2 kuesioner, sehingga total subjek penelitian yang akan diberikan kuesioner sebanyak 70 responden. Untuk lebih jelasnya sampel dari populasi dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue	Jumlah Kuesioner
1	Dinas Pendidikan	2
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	2
3	Dinas Kesehatan	2
4	Rumah Sakit Umum Daerah	2
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah	2
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
8	Dinas Sosial	2
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	2
11	Dinas Pertanahan	2
12	Dinas Lingkup Hidup	2
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2
15	Dinas Perhubungan	2
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	2
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	2
19	Dinas Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah	2
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2
21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2
22	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2
23	Dinas Pertanian Dan Pangan	2
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	2
25	Sekretariat Daerah	2
26	Sekretariat DPRK	2
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
30	Inspektorat Daerah	2
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	2
33	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	2
34	Dinas Syariat Islam	2
35	Sekretariat Majelis Adat Aceh	2
Jumlah Responden		70

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari survey lapangan dengan penyebaran kuesioner mengenai pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan ketepatan waktu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, artikel, situs web, peraturan undang-undang dan penelitian sebelumnya.

Data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam teknik penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan suatu penelitian.
2. Penelitian Lapangan yaitu penelitian langsung kelapangan dalam rangka mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa, daftar pertanyaan atau pernyataan (Kuesioner) yaitu dalam bentuk angket yang ditujukan kepada para responden.

3. Studi Pustaka yaitu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen (Y) Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simeulue. Ketepatan waktu laporan keuangan adalah rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan ditutup yaitu pada tanggal 31 Desember hingga tanggal ketika auditor selesai melakukan proses audit yang tercantum di tanggal tandatangan oleh auditor eksternal, yang berarti semakin cepat auditor menandatangani laporan keuangan maka semakin cepat laporan keuangan (Arifa, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Variabel ketepatanwaktu pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya adalah relevan, andal dan dapat dipahami serta dapat dibandingkan.

3.4.2 Variabel Independen

3.4.2.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku dari menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pekerjaan. Efektivitas dan efisiensi menjadi alasan utama diperlukannya pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan pekerjaan. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi maka dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan dan efisiensi pertukaran informasi dalam jumlah yang besar sehingga peran pemanfaatan teknologi informasi sangat penting bagi peningkatan kinerja (Subyantoro, 2021). Variabel ini diukur dengan menggunakan item pertanyaan yang berkaitan dengan komputer yang tersedia dan sudah digunakan, pemanfaatan jaringan internet, proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi, adanya *software* pendukung serta adanya jadwal pemeliharaan peralatan.

3.4.2.2 Pengawasan Keuangan Daerah (X2)

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengolahan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku (Rosmalita, 2020). Variabel pengawasan keuangan daerah dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya adalah Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, Evaluasi Kegiatan, Pencatatan transaksi berdasarkan bukti, Sistem pengawasan pelaksanaan tugas, Pencatatan transaksi berdasarkan waktu dan Laporan keuangan sesuai SAP.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan dapat dirujuk pada tabel 3.2 definisi operasional variabel.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Item Pernyataan
1	Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan (Y)	Ketepatanwaktu adalah salah satu aspek untuk menjamin laporan keuangan berfungsi sebagai mana mestinya. mewujudkan ketepatanwaktu tersebut maka peran teknologi informasi diperlukan (Megasiswi, 2020).	1. Dapat dipahami. 2. Relevan. 3. Andal. 4. Dapat dibandingkan.	Likert	KPK. 1-3 Pernyataan
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₁)	Pemanfaatan teknologi secara umum merupakan penggunaan secara optimal dari komputer untuk mengolah data, memproses, menyimpan, mendapatkan, menampilkan, dan mengirimkan dalam berbagai bentuk dan cara yang digunakan untuk menghasilkan manfaat yang dapat berguna bagi pemakainya (Anjani, 2021).	1. Komputer yang memadai. 2. Pemanfaatan jaringan internet.	Likert	PTI. 1-6 Pernyataan
3	Pengawasan Keuangan Daerah (X ₂)	Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan meneliti setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan (Binawati, 2022).	1. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti. 2. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas. 3. Pencatatan transaksi berdasarkan waktu. Laporan keuangan sesuai SAP.	Likert	C. 1-5 Pernyataan

Sumber: Data diolah, 2023

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode regresi linier berganda yaitu untuk menunjukkan tentang bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan bantuan SPSS V20.

1.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif kuantitatif yaitu data yang terkumpul kemudian dikategorikan menurut kriterianya masing-masing dan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisa secara deskriptif berdasarkan teori-teori yang ada. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

1.5.2 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan

α = Konstanta

b_1b_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_2 = Pengawasan Keuangan Daerah

e = Kesalahan Gangguan (*error term*)

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Pengujian Instrumen

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skor 1-5 digunakan karena lebih sederhana dan memiliki nilai tengah yang digunakan untuk menjelaskan keraguan atau netral dalam memilih jawaban. Oleh karena itu skala likert lazim digunakan di Indonesia untuk yang mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Untuk analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor yang ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

3.6.1.1 Pengujian Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memeriksa apakah instrumen penelitian yang disiapkan memang akurat sehingga dapat mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas dilakukan untuk memeriksa apakah instrumen penelitian yang disiapkan memang akurat sehingga dapat mengukur apa yang akan diukur (Afifah, 2021). Kriteria pengambilan keputusan uji validitas adalah sebagai berikut:

- Membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r . kriterianya jika nilai hitung r lebih besar ($>$) dari nilai tabel r , maka item instrumen dinyatakan valid.
- Membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r . Kriterianya jika nilai hitung r lebih kecil ($<$) dari nilai tabel r , maka item instrumen dinyatakan valid.

3.6.1.2 Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas ini merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang atas setiap pertanyaan pada kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Aghnasyifa, 2019). Kriteria pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data tersebut dapat diterima.
- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka item yang digunakan kurang baik.

1.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

3.6.2.1 Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui model regresi yang baik yaitu apabila variabel-variabel yang diteliti mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Firmansyah, 2020).

Dalam sebuah pengujian apakah data sampel yang berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal atau tidak perlu diajukan hipotesis sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.6.2.2 Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pada model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (Aminah, 2019). Kriteria yang menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai VIF > 10 dan Tolerance $< 0,10$ maka disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi terdapat masalah multikolinearitas.
- Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,10$ maka disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas.

3.6.2.3 Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Uji ini dapat dilakukan menggunakan grafik plot dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi

heterokedastisitas (Dewanti, 2020). Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- H_0 = Tidak terjadi heteroskedastisitas di antara pengamatan dengan nilai residual absolutnya.
- H_a = Terjadi heteroskedastisitas antara data pengamatan dengan nilai residual absolutnya.

3.6.2.4 Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi merupakan keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya autokorelasi (Mardiatmoko, 2020). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian *Durbin Watson* (DW) dengan kriteria pengambilan keputusannya:

- Angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif.
- Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D-W di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Putri, 2019). Uji F dilakukan menggunakan tabel ANOVA yang bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan. Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis secara bersama – sama (simultan) adalah sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value$ (nilai signifikan $> 0,05$) maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima). Artinya bahwa variabel independen secara bersama – sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P\ value$ (nilai signifikan $< 0,05$) maka H_a tidak ditolak (H_0 tidak diterima). Artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.2 Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Uji t mengatakan t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Nanincova, 2019). Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis secara individu (parsial) sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P\ value$ (nilai signifikan $> 0,05$) maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima). Artinya bahwa, variabel independen secara individu (parsial) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P\ value$ (nilai signifikan $< 0,05$) maka H_a tidak ditolak (H_0 tidak diterima). Artinya bahwa variabel independen secara individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue berjumlah 35 SKPD yang terdiri dari dinas dan badan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner. Kuesioner diberikan kepada setiap 35 SKPD yang menjadi sampel penelitian. Setiap SKPD dipilih masing-masing 2 responden untuk mengisi kuesioner penelitian. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara diantar langsung oleh peneliti ke setiap instansi yang menjadi sampel penelitian.

Berdasarkan jumlah, kuesioner yang dibagikan adalah 70 kuesioner atau 35 SKPD yang menjadi sampel penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai deskriptif data penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Deskriptif Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah SKPD	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
1	Kuesioner yang dibagikan	30 Dinas	60 Kuesioner	66,7
2	Kuesioner yang dibagikan	5 Badan	10 Kuesioner	33,3
	Kuesioner yang digunakan dalam penelitian	35 SKPD	70 Kuesioner	100,0

Sumber: Data Diolah, 2023

4.2 Karakteristik Responden

Responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, jabatan, dan masa kerja. Keberagaman karakteristik responden secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	42	60,0
	a. Laki-Laki	28	40,0
	b. Perempuan		
Total		70	100%
2	Status Pernikahan	51	72,9
	a. Menikah	19	27,1
	b. Belum Menikah		
Total		70	100%
3	Pendidikan Terakhir	5	7,1
	a. SMA	10	14,3
	b. Diploma	48	68,6
	c. Sarjana	7	10,0
	d. Pasca sarjana		
Total		70	100%
4	Jabatan	35	50,0
	a. Sekretaris	35	50,0
	b. Kasubag Keuangan		
Total		70	100%
5	Masa Kerja	9	12,9
	a. < 3 Tahun	44	62,9
	b. 4 – 10 Tahun	17	24,3
	c. >> 11 Tahun		
Total		70	100%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 42 responden atau sebesar 60,0% sedangkan

sisanya sebanyak 28 responden atau sebesar 40,0% berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari status pernikahan dapat dijelaskan yang sudah menikah adalah sebanyak 51 responden atau sebesar 72,9% dan yang belum menikah sebanyak 19 responden atau sebesar 27,1%.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata responden telah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 48 responden atau sebesar 68,6%, kemudian responden tingkat pendidikan D3 sebanyak 10 responden atau sebesar 14,3%, sisanya responden mempunyai tingkat pendidikan pasca sarjana sebanyak 7 responden atau sebesar 10,0% dan sisanya tingkat pendidikan SMA sebanyak 5 responden atau 7,1%.

Selanjutnya terlihat bahwa jabatan responden dalam penelitian ini terdiri dari kasubag keuangan dan staf akuntansi masing-masing sebanyak 35 atau sebesar 50,0%. Kemudian ditinjau dari masa kerja responden mempunyai masa kerja diantara 4 sampai 10 tahun yaitu sebanyak 44 responden atau sebesar 62,9%, selanjutnya mempunyai masa kerja lebih dari 11 tahun sebanyak 17 responden atau sebesar 24,3%, dan sisanya kurang lebih dari 3 tahun sebanyak 9 responden atau sebesar 12,9%.

4.2.1 Distribusi Jawaban Responden Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian dari distribusi jawaban responden tentang ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Informasi yang dibutuhkan segera tersedia.	0	0	0	0	10	14,3	37	52,9	23	32,9	4,19
2	Laporan periode tertentu disediakan secara sistematis dan teratur.	0	0	0	0	10	14,3	33	47,1	27	38,6	4,24
3	Laporan neraca, sisa hasil usaha, dan laporan arus kas ditempat saya bekerja disampaikan secara sistematis dan teratur.	0	0	0	0	7	10,0	35	50,0	28	40,0	4,30
Rerata												4,24

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada tabel 4.3 di atas menunjukkan deskripsi jawaban 70 responden untuk masing-masing butir pernyataan mengenai variabel ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Rerata jawaban responden untuk butir pernyataan mengenai ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan yakni 4,24. Berdasarkan kelas interval nilai rata-rata jawaban responden terkait variabel tersebut adalah setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

penerapan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Simeulue sudah baik. Indikator KPK3 merupakan indikator dengan nilai rata-rata tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan neraca, sisa hasil usaha, dan laporan arus kas di setiap ODP disampaikan secara sistematis dan teratur.

1.2.2 Distribusi Jawaban Responden Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil penelitian dari distribusi jawaban responden tentang pemanfaatan teknologi informasi dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Distribusi Jawaban Responden terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Saya sebagai pengelola keuangan telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas	0	0	0	0	7	10,0	31	44,3	32	45,7	4,36
2	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.	0	0	1	1,4	7	10,0	29	41,4	33	47,1	4,34
3	Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan software sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	9	12,9	35	50,5	26	37,1	4,24
4	Terdapat sistem keamanan komputer antivirus dan menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur.	0	0	0	0	6	8,6	32	45,7	32	45,7	4,37
5	Saya sebagai pengelola keuangan	0	0	0	0	5	7,1	26	39,1	39	55,7	4,49

No	Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
	telah memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan											
6	Jaringan internet di ODP tempat saya bekerja selalu dalam kondisi yang baik untuk digunakan.	0	0	0	0	7	10,0	31	44,3	32	45,7	4,36
Rerata												4,36

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada tabel 4.4 di atas menunjukkan deskripsi jawaban 70 responden untuk masing-masing butir pernyataan mengenai variabel pemanfaatan teknologi informasi. Rerata jawaban responden untuk butir pernyataan pemanfaatan teknologi informasi secara keseluruhan yakni 4,36. Berdasarkan kelas interval nilai rata-rata jawaban responden terkait variabel tersebut adalah sangat setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pemanfaatan teknologi informasi pada SKPD Kabupaten Simeulue sangat baik. Indikator PTI5 merupakan indikator dengan nilai rata-rata tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai sebagai pengelola keuangan telah memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan.

1.2.3 Distribusi Jawaban Responden Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian dari distribusi jawaban responden tentang pengawasan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

No	Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).	0	0	0	0	12	17,1	38	54,3	20	28,6	4,11
2	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan.	0	0	0	0	12	17,1	38	54,3	20	28,6	4,16
3	Setiap kegiatan atau transaksi keuangan telah dicatat dan setiap pencatatan berdasarkan bukti yang cukup.	0	0	0	0	12	17,1	35	50,0	23	32,9	4,07
4	Terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas.	0	0	0	0	16	22,9	31	44,3	23	32,9	4,10
5	Laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan serta disusun secara tepat waktu.	0	0	0	0	4	5,7	31	44,3	35	50,0	4,44

No	Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
Rerata												4,17

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 4.5 di atas menunjukkan deskripsi jawaban 70 responden untuk masing-masing butir pernyataan mengenai variabel pengawasan keuangan daerah. Rerata jawaban responden untuk butir pernyataan mengenai pengawasan keuangan daerah secara keseluruhan yakni 4,17. Berdasarkan kelas interval nilai rata-rata jawaban responden terkait variabel tersebut adalah setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Simeulue sudah baik. Indikator PKD5 merupakan indikator dengan nilai rata-rata tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan serta disusun secara tepat waktu.

1.3 Statistik Deskriptif

Pendeskripsian terhadap variabel penelitian bertujuan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini menggunakan program SPSS V.20 yang dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi	70	3,00	5,00	4,2433	,56761
Pengawasan Keuangan Daerah	70	3,00	5,00	4,3593	,49865
Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	70	3,00	5,00	4,1771	,53897
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari Tabel diatas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 responden dari 35 SKPD di Kabupaten Simeulue. Untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi tersebut diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 4,2433 dengan standar deviasi ,56761 dengan nilai tertinggi 5,00 dan nilai terendah 3,00. Pada variabel pengawasan keuangan daerah diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 4,3593 dengan standar deviasi ,49865 dengan nilai tertinggi 5,00 dan nilai terendah 3,00. Sedangkan untuk variabel ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 4,1771 dengan standar deviasi ,53897 dengan nilai tertinggi 5,00 dan nilai terendah 3,00.

1.4 Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Simeulue diperoleh hasil pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,402	,529		2,652	,010		
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,148	,138	,130	1,067	,290	,664	1,506
Pengawasan Keuangan Daerah	,526	,128	,499	4,105	,000	,664	1,506

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari hasil pengujian regresi linier berganda di atas dapat disimpulkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,402 + 0,148 + 0,526 + e$$

1. Nilai konstanta (a) bernilai positif sebesar 1,402. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dianggap nol atau bernilai tetap, maka nilai ketepatanwaktu pemerintah daerah akan bernilai sebesar 1,402.
2. Nilai koefisien pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif sebesar 0,148. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu kesatuan pemanfaatan teknologi informasi, maka akan meningkatkan ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,148 dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Nilai koefisien pengawasan keuangan daerah sebesar 0,526. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu kesatuan pengawasan keuangan daerah, maka akan meningkatkan ketepatanwaktu pelaporan

keuangan pemerintah daerah sebesar 0,526 dengan asumsi variabel lain konstan.

4.5 Hasil Pengujian Data

4.5.1 Pengujian Validitas Instrumen

Uji validitas bertujuan untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud merupakan pertanyaan – pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Jika nilai hitung r lebih besar dari nilai tabel r , maka item instrumen dinyatakan valid. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Validitas

Item Pernyataan	Variabel	Pearson Correlation R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1	Ketepatanwaktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah	0,877	0,235	Valid
Y2		0,847	0,235	Valid
Y3		0,828	0,235	Valid
X1.1	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,705	0,235	Valid
X1.2		0,755	0,235	Valid
X1.3		0,784	0,235	Valid
X1.4		0,755	0,235	Valid
X1.5		0,712	0,235	Valid
X1.6		0,793	0,235	Valid
X2.1	Pengawasan Keuangan Daerah	0,785	0,235	Valid
X2.2		0,823	0,235	Valid
X2.3		0,796	0,235	Valid
X2.4		0,800	0,235	Valid
X2.5		0,645	0,235	Valid

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari tabel hasil pengujian validitas diketahui bahwa pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner mengenai ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan

daerah memiliki r-hitung lebih besar dari r-tabel dengan nilai 0,235. Oleh karena itu, hasil uji validitas semua variabel dinyatakan valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,235 dengan taraf signifikan 5%. dan dapat dilakukan pengujian pada tahap selanjutnya.

1.5.2 Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini pengujian realibilitas diukur menggunakan *Cronbach's Alpha*. Apabila *Cronbach's Alpha* (α) lebih besar dari 0,5 maka instrumen yang terdapat pada kuesioner penelitian dinyatakan andal atau *reliable*. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
1	Ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah	0,808	Handal
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,845	Handal
3	Pengawasan Keuangan Daerah	0,829	Handal

Sumber: Data Diolah, 2023

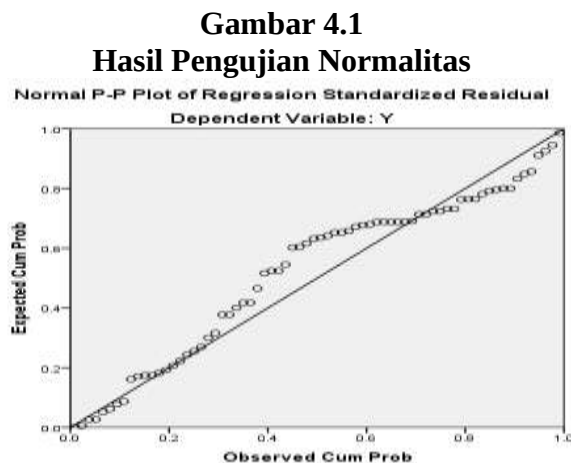
Dari tabel diatas dapat diketahui hasil pengujian realibilitas untuk instrumen yang ada dalam kuesioner mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai *Cronbach's Alpha* (α) yang lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, hasil pengujian intrumen reliabilitas dapat

dikatakan handal sehingga dapat digunakan untuk pengujian pada tahap selanjutnya.

1.6 Pengujian Asumsi Klasik

1.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal suatu grafik. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian model regresi layak digunakan dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1.



Berdasarkan pada gambar 4.1 grafik P-Plot di atas, data dalam penelitian berdistribusi normal karena penyebaran data plotting mengikuti garis diagonal seperti yang terlihat pada gambar di atas.

1.6.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas diuji dengan melihat nilai VIF dari masing-masing variabel independen. Apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Nilai VIF Variabel Bebas

No	Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1)	0,664	1,506	Non Multikolinieritas
2	Pengawasan Keuangan Daerah (X_2)	0,664	1,506	Non Multikolinieritas

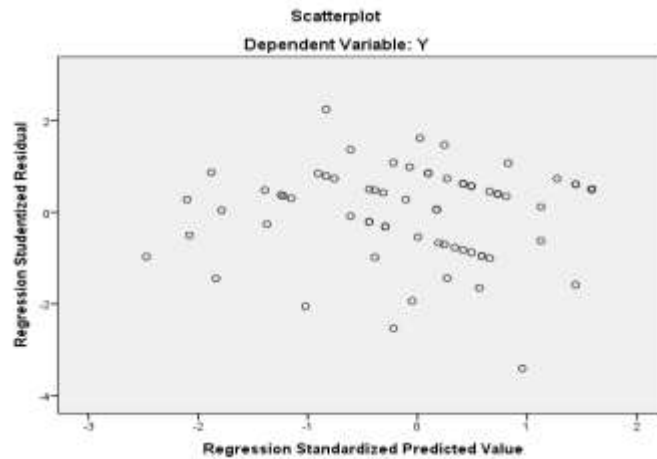
Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil perhitungan nilai tolerance pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai tolerance $> 0,10$. Nilai tolerance $0,664 > 0,10$ dan $VIF\ 1,506 < 10$, maka artinya tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

1.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variable terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Jika ada pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Adapun cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Hasil Pengujian heteroskedastisitas



Sesuai dengan gambar 4.2, grafik *scatterplot* memperlihatkan penyebaran data tidak memiliki bentuk secara pasti (berkembang, melebar kemudian menyempit) pada gambar *scatterplot*, serta titik–titik menyebar secara acak di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Artinya pada model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, yang maka layak dipakai dalam mengukur ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan variable yang mempengaruhi.

1.6.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai du sebesar $1,671 < Durbin\ Watson\ 1,886 < 4-du\ 2,329$. Jadi, karena nilai *Durbin Watson* terletak antara du sampai dengan $4-du$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Dengan demikian, maka asumsi

klasik sudah terpenuhi mulai dari normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

1.7 Hasil Pengujian Hipotesis

1.7.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai F hitung sebesar 17,363 sementara F tabel sebesar 3,13. dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan hipotesis apabila F hitung $>$ F tabel dengan tingkat signifikan 5%, H_a diterima H_o ditolak. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel anova 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Secara Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
¹ Regression	7,589	2	3,794	17,363	.000 ^b
Residual	14,642	67	,219		
Total	22,231	69			

Sumber: Data Diolah, 2023

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk lebih jelasnya hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.584 ^a	.341	.322	.46748	2,225

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari Tabel 4.12 di atas diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,322 atau 32,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keragaman variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah sebesar 32,2%. Sedangkan sisanya sebesar 67,8 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

1.7.2 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Pengujian secara parsial digunakan untuk mengetahui tingkat apakah secara parsial pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Seacara Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
¹ (Constant)	1,402	,529		2,652	,010
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,148	,138	,130	1,067	,290
Pengawasan Keuangan Daerah	,526	,128	,499	4,105	,000

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian parsial dengan uji t pada Tabel , dapat dinyatakan bahwa:

1. Hasil perhitungan variabel pemanfaatan teknologi informasi diperoleh nilai t hitung sebesar 1,067 dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel ($1,067 < 1,995$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil perhitungan variabel pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 4,105 dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel ($4,105 > 1,995$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, artinya pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.8 Pembahasan

Hasil penelitian telah diperoleh melalui pengujian regresi linier berganda pada bagian sebelumnya. Selanjutnya pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah akan dibahas sebagai berikut:

1.8.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan daerah terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai F hitung sebesar 17,363 dimana nilai tersebut lebih besar dari f tabel ($17,363 > 3,13$) dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari taraf 0,05. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Artinya analisis statistik dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_{a1} diterima. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Afriani (2021) tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah

terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan berdampak positif terhadap ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Suartini (2023) ketepatanwaktu merupakan batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi yang dapat dicapai dengan peran pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini mencerminkan betapa ketepatanwaktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian laporan keuangan kepada publik sehingga pemerintah diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangannya agar informasi tersebut tidak kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

1.8.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,067 dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel ($1,067 < 1,995$) dengan tingkat signifikan 0,290 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari taraf 0,05. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Artinya analisis statistik dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_{02} ditolak. Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Maharani (2021) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen

organisasi terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah nagari, sedangkan sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah nagari.

Penelitian ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Soufitri (2022) dimana pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa apabila karyawan dapat memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan tugas mereka dengan baik, maka teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan jauh lebih optimal.

1.8.3 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,105 dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel ($4,105 > 1,995$) dengan tingkat signifikan 0,000 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari taraf 0,05. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak. Artinya analisis statistik dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_3 diterima. Pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ukkas (2021) tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan

keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal maupun pengawasan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial bagi ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini konsisten dengan teori yang dikemukakan Mahulae (2022) pada umumnya tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan atau rencana serta intruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui atau tidak sulitnya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektifitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasana keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keungan pemerintah daerah.
3. Pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Simeulue yang diharapkan dapat meningkatkan ketepatanwaktu dalam memberikan informasi kepada publik. Adapun saran-saran yang diberikan bagi pemerintah daerah Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue untuk lebih mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sehingga pelaporan dan pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih baik lagi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue harus lebih meningkatkan pengawasan keuangan daerah pada setiap SKPD di Kabupaten Simeulue sehingga menggerakkan roda aktivitas kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.
3. Bagi Akademik, diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal ilmu akuntansi dan dapat memberikan informasi tentang keterkaitan antara variabel yang diteliti dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian yang sama, diharapkan dapat menambah indikator, metode penelitian yang sama tetapi teknik analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. G., Muniruddin, S., & Priantana, R. D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Skpd Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 43-53.
- Afriani, N. (2021). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)* (Doctoral dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).
- Aghnasyifa, N. D. (2019). *Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance* (Bachelor's thesis, Fakultas ekonomi dan bisnis uin jakarta).
- Aminah, A., Khairudin, K., & Indrayenti, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 22-33.
- Anjani, N. L. W. S., Arizona, I. P. E., & Ernawatiningsih, N. P. L. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kemampuan Teknik Personal, Pengalaman Kerja, Dan Pelatihan Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Di Kabupaten Karangasem. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1).
- Arifa, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Azaluddin. (2023). *Implikasi Managing Asset: Kinerja Keuangan Sektor Publik Laporan Keuangan PEMDA Provinsi Sultra*. Malang: Ranacipta Mandiri.
- Badan Pemeriksaan Keuangan. (2021). *Siaran Pers Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue*. Diakses 3 May 2021.
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32-49.

- Damanik, E. B., Hayat, A., & Sayudi, A. (2022). Pengaruh Penatausahaan Aset dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Kabupaten Barito Utara. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 12(1), 1-12.
- De Romario, F., Rangga, Y. D. P., & Erlin, Y. (2023). Pengaruh kinerja pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(2), 45-53.
- Dewanti, F. D., & Riharjo, I. B. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Effendi, S. (2021). *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintahan Daerah*. Kepulauan Riau: CV. Batam Publisher.
- Firmansyah, D., & Dewi, T. H. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6), 1107-1116.
- Hadis, F., Ihsan, H., Dwiharyadi, A., Septriani, Y., & Afni, Z. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 106-121.
- Hasyim, M. (2023). *Penggunaan Teknologi Informasi di Pasantren*. Jawa timur: Academia Publication.
- Isnayanti, K. I. K., & Yuniarta, G. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Laporan Keuangan Pengurus Koperasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Tingkat Ketepatwaktuan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(02), 548-560.
- Jurdi, M. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karianga, H. (2023). *Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Alumni.
- Maharani, A., & Agustin, H. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 32-49.

- Mahulae, D. Y. D. (2022). Pengantar manajemen. Padang Sidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda (studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda [*canarium indicum* L.]). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333-342.
- Megasiwi, I. A., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(1).
- Nanincova, N. (2019). Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan noach cafe and bistro. *Agora*, 7(2).
- Nugraha, B. D. (2023). *Sistem Informasi Akuntansi*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Pelamonnia, J. T. (2021). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap etepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah: studi empiris di pemerintah provinsi maluku. *Jurnal ekonomi, sosial & humaniora*, 2(06), 39-52.
- Priyambodo, K. V., dkk. (2022). *Akuntansi Pemerintahan*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Pohan, A. I. Y. (2021). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan)* (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).
- Pratiwi, E. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah (Bkud) Kabupaten Pinrang. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 135-141.
- Putri, U. A., Hafidhah, H., & Firmansyah, I. D. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Opd Kabupaten Sumenep. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1(1), 11-19.
- Putri, N. A., & Lestari, D. (2019). Pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Jakarta. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 31-42.

- Rifai, A. (2020). *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*. Makassar: CV> Nas Media Pustaka.
- Rosmalita, N., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 239-248.
- Sitepu, P, A. (2022). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka.
- Sinulingga, P. S. B., Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). *Jurnal Manajemen*, 8(1), 89-106.
- Soufitri, F. (2022). *Konsep Sistem Informasi*. Padang Sidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Suartini S., dkk. (2023). *Unsur-Unsur Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: CV. Absolute Media
- Subyantoro A., dkk. (2021). *Peran pengetahuan lokal petani terhadap kinerja*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ukkas, R., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 198-210.
- Widagdo, S. (2021). *Menggapai Impian*. Jawa Barat: Guepedia.
- Zebua, A., & Gultom, S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)*, 6(1), 88-101.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Banda Aceh,

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bpk/Ibu/Sdr.....

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya :

Nama : Elfina Ameria

NPM : 2002110096

Program Studi : Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Simeulue)**”. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr selaku untuk menjadi responden dan menjawab seluruh item pertanyaan secara objektif sesuai dengan petunjuk pengisian.

Saat melakukan pengisian kuesioner ini, dimohon Bapak/Ibu/Saudara/I terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian kuesioner yang sudah tertera. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I akan sangat berharga dan bermanfaat bagi penelitian. Atas kerjasama, bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya

Elfina Ameria

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi daftar di bawah ini:

1. Nama : Boleh Dikosongkan
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
☐ SMA/Sederajat
☐ Diploma 3
☐ Strata 1
☐ Strata 2
☐ Lainnya
5. Lama Bekerja :
6. Bagian/Departemen :
7. Jabatan :

Petunjuk Pengisian :

1. Mohon dengan hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam kuisioner ini.
2. Beri tanda centang (✓) pertanyaan berikut dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia.
3. Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pertanyaan serta penilaian yaitu :

- | | | |
|-----|-----------------------|-----------|
| STS | = Sangat Tidak Setuju | : Nilai 1 |
| TS | = Tidak Setuju | : Nilai 2 |
| N | = Netral | : Nilai 3 |
| S | = Setuju | : Nilai 4 |
| SS | = Sangat Setuju | : Nilai 5 |

A. Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Informasi segera tersedia ketika dibutuhkan.	1	2	3	4	5
2	Laporan periode tertentu disediakan secara sistematis dan teratur.	1	2	3	4	5
3	Laporan neraca, sisa hasil usaha, dan laporan arus kas di tempat saya bekerja disampaikan secara sistematis dan teratur.	1	2	3	4	5

B. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₁)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya sebagai pengelola keuangan telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas	1	2	3	4	5
2	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.	1	2	3	4	5
3	Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan software sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1	2	3	4	5
4	Terdapat sistem keamanan komputer antivirus dan menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur.	1	2	3	4	5
5	Saya sebagai pengelola keuangan telah memanfaatkan jaringan internet di unit sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan	1	2	3	4	5
6	Jaringan internet di ODP tempat saya bekerja selalu dalam kondisi yang baik untuk digunakan.	1	2	3	4	5

C. Pengawasan Keuangan Daerah (X₂)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).	1	2	3	4	5
2	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan.	1	2	3	4	5
3	Setiap kegiatan atau transaksi keuangan telah dicatat dan setiap pencatatan berdasarkan bukti yang cukup.	1	2	3	4	5
4	Terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas.	1	2	3	4	5
5	Laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan serta disusun secara tepat waktu.	1	2	3	4	5

Lampiran 2: Tabel Tabulasi Responden

No	Karakteristik Responden					Ketepatanwaktu			Y	Pemanfaatan Teknologi Informasi						X1	Pengawasan Keuangan Daerah					X2
	KR1	KR2	KR3	KR4	KR5	KPK1	KPK2	KPK3		PTI1	PTI2	PTI3	PTI4	PTI5	PTI6		PKD1	PKD2	PKD3	PKD4	PKD5	
1	1	1	3	1	2	4	4	4	4.00	5	5	5	5	5	5	5.00	4	4	4	4	4	4.00
2	1	1	3	2	2	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
3	1	1	3	1	2	4	5	4	4.33	4	4	3	4	5	4	4.00	4	3	4	4	4	3.80
4	2	1	3	2	2	5	5	4	4.67	4	4	4	5	5	5	4.50	4	4	4	5	5	4.40
5	2	1	3	1	2	4	4	4	4.00	5	4	4	4	5	4	4.33	4	4	4	4	4	4.00
6	1	1	3	2	2	4	4	4	4.00	5	5	4	4	4	4	4.33	4	4	4	4	4	4.00
7	1	1	3	1	1	5	5	5	5.00	5	5	4	5	5	4	4.67	5	5	5	5	5	5.00
8	2	1	2	2	2	5	5	5	5.00	5	5	4	5	5	4	4.67	5	5	5	5	5	5.00
9	2	1	3	1	2	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	4	4.80
10	2	2	3	2	2	4	4	4	4.00	5	4	4	5	4	5	4.50	4	4	4	5	5	4.40
11	1	2	4	1	3	4	4	5	4.33	5	5	5	4	4	5	4.67	4	4	4	4	5	4.20
12	1	1	3	2	3	5	4	5	4.67	4	4	4	5	5	5	4.50	4	5	4	4	4	4.20
13	1	1	3	1	3	4	5	5	4.67	4	5	4	5	4	5	4.50	4	4	5	4	4	4.20
14	2	1	2	2	3	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
15	1	2	3	1	3	5	5	5	5.00	4	5	4	4	5	4	4.33	5	4	4	4	4	4.20
16	1	1	2	2	1	3	4	4	3.67	4	3	4	4	4	4	3.83	3	3	3	3	3	3.00
17	2	1	3	1	2	4	3	5	4.00	5	4	4	3	5	5	4.33	4	4	3	4	4	3.80
18	1	2	3	2	2	3	3	3	3.00	3	3	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3	3	3.00
19	2	2	3	1	2	5	5	4	4.67	4	4	5	5	5	4	4.50	4	4	3	5	4	4.00
20	1	2	4	2	1	4	4	4	4.00	4	4	4	4	5	4	4.17	4	5	5	5	4	4.60
21	1	1	3	1	2	3	3	3	3.00	5	4	5	5	5	5	4.83	3	4	3	4	3	3.40
22	2	1	3	2	1	5	3	5	4.33	4	2	4	4	3	3	3.33	5	4	3	5	5	4.40
23	1	1	3	1	1	3	3	3	3.00	5	5	5	5	5	5	5.00	4	5	5	5	4	4.60
24	2	1	1	2	3	3	4	4	3.67	4	5	5	5	5	5	4.83	3	3	4	4	5	3.80
25	1	1	2	1	3	4	4	4	4.00	4	4	3	3	5	5	4.00	4	4	5	5	4	4.40

26	2	1	3	2	2	4	4	4	4.00	4	4	5	4	5	4	4.33	3	3	3	3	5	3.40
27	1	1	3	1	2	3	3	3	3.00	3	3	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3	5	3.40
28	1	2	3	2	2	4	5	4	4.33	5	5	4	5	5	5	4.83	4	4	4	3	4	3.80
29	1	1	3	1	3	4	4	4	4.00	4	4	5	5	5	5	4.67	5	5	5	5	5	5.00
30	1	2	4	2	2	5	5	4	4.67	4	5	5	4	4	4	4.33	5	5	4	4	5	4.60
31	2	1	3	1	2	4	4	4	4.00	5	5	4	4	4	4	4.33	3	3	3	3	3	3.00
32	2	1	3	2	3	4	5	5	4.67	4	5	5	4	5	5	4.67	5	5	4	5	4	4.60
33	2	1	3	1	2	3	4	4	3.67	3	4	3	4	3	3	3.33	4	4	3	3	4	3.60
34	2	2	4	2	2	5	4	5	4.67	5	5	5	5	4	5	4.83	4	4	4	4	4	4.00
35	1	2	3	1	3	4	5	5	4.67	5	4	4	5	4	4	4.33	3	3	3	5	5	3.80
36	1	1	1	2	2	4	4	5	4.33	5	5	5	5	5	5	5.00	4	4	4	3	4	3.80
37	1	1	2	1	3	3	3	3	3.00	5	5	4	4	5	4	4.50	4	4	4	4	4	4.00
38	1	2	2	2	3	5	4	5	4.67	3	4	4	4	5	5	4.17	4	5	4	4	5	4.40
39	1	1	2	1	2	4	4	3	3.67	4	5	5	5	5	5	4.83	5	4	4	4	5	4.40
40	1	1	2	2	3	4	4	4	4.00	4	3	3	4	4	4	3.67	4	3	3	4	4	3.60
41	1	1	3	1	3	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5.00
42	2	1	3	2	3	4	4	4	4.00	5	5	4	5	5	5	4.83	5	4	4	4	4	4.20
43	2	1	3	1	3	5	4	4	4.33	4	4	4	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	4.00
44	2	2	3	2	2	4	4	4	4.00	4	4	4	4	4	5	4.17	4	4	5	5	5	4.60
45	2	1	3	1	2	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5.00
46	2	2	3	2	2	3	3	4	3.33	3	3	3	3	4	3	3.17	3	3	3	3	4	3.20
47	1	1	4	1	2	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5.00
48	2	1	4	2	2	4	4	4	4.00	4	5	5	4	4	4	4.33	5	4	4	4	5	4.40
49	2	1	3	1	2	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5.00
50	2	1	1	2	2	5	5	4	4.67	5	5	4	5	5	4	4.67	4	5	5	5	5	4.80
51	1	1	3	1	3	4	3	4	3.67	4	4	4	4	4	3	3.83	3	3	3	3	4	3.20
52	1	1	3	2	2	4	5	5	4.67	5	5	4	4	5	4	4.50	4	5	5	4	4	4.40
53	1	1	3	1	2	4	5	5	4.67	4	5	5	5	4	5	4.67	4	5	4	4	5	4.40

54	2	2	3	2	2	5	5	5	5.00	4	4	4	4	4	4	4.00	5	5	4	5	5	4.80
55	2	2	1	1	2	4	4	4	4.00	3	3	4	5	4	4	3.83	3	3	5	3	4	3.60
56	1	1	3	2	2	4	4	4	4.00	4	5	5	4	5	5	4.67	4	4	5	4	5	4.40
57	1	1	3	1	2	4	4	4	4.00	3	4	4	4	5	4	4.00	3	4	3	3	4	3.40
58	1	1	3	2	2	4	4	4	4.00	4	5	4	4	4	5	4.33	4	4	5	5	5	4.60
59	2	2	4	1	2	4	5	4	4.33	4	4	3	4	4	3	3.67	4	5	3	3	4	3.80
60	1	1	3	2	2	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5	5.00	5	5	5	5	5	5.00
61	2	1	3	1	1	4	4	5	4.33	5	4	5	5	5	4	4.67	5	5	5	4	5	4.80
62	2	2	3	2	2	4	4	5	4.33	4	4	3	4	4	4	3.83	4	4	3	3	5	3.80
63	1	2	3	1	1	5	5	5	5.00	4	5	5	5	5	5	4.83	4	4	4	4	5	4.20
64	1	1	2	2	1	5	5	4	4.67	5	4	5	5	4	4	4.50	4	5	5	4	5	4.60
65	1	1	3	1	1	5	5	5	5.00	4	5	4	3	3	4	3.83	5	4	3	3	4	3.80
66	1	2	3	2	2	4	3	4	3.67	5	3	4	4	5	4	4.17	4	4	5	4	5	4.40
67	1	1	3	1	2	4	5	5	4.67	5	5	4	5	4	5	4.67	4	4	5	4	5	4.40
68	1	1	2	2	2	4	4	5	4.33	5	4	5	5	5	4	4.67	5	4	4	3	5	4.20
69	1	1	1	1	2	3	4	3	3.33	5	4	4	4	4	4	4.17	4	4	4	4	5	4.20
70	1	1	3	2	2	5	5	4	4.67	5	4	4	4	5	5	4.50	4	5	4	5	5	4.60

Lampiran 3: Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	70	3.00	5.00	4.2433	.56761
X1	70	3.00	5.00	4.3593	.49865
X2	70	3.00	5.00	4.1771	.53897
Valid N (listwise)	70				

Lampiran 4: Hasil Regresi Linier Berganda

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.419	.575
	X1	.419	1.000	.580
	X2	.575	.580	1.000
Sig. (1-tailed)	Y		.000	.000
	X1	.000		.000
	X2	.000	.000	
N	Y	70	70	70
	X1	70	70	70
	X2	70	70	70

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b		Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.584 ^a	.341	.322	.46748	2.225

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.589	2	3.794	17.363	.000 ^b
Residual	14.642	67	.219		
Total	22.231	69			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.402	.529		2.652	.010		
X1	.148	.138	.130	1.067	.290	.664	1.506
X2	.526	.128	.499	4.105	.000	.664	1.506

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
			(Constant)	X1	X2
1 1	2.986	1.000	.00	.00	.00
2	.008	19.184	.73	.00	.61
3	.006	23.021	.26	1.00	.39

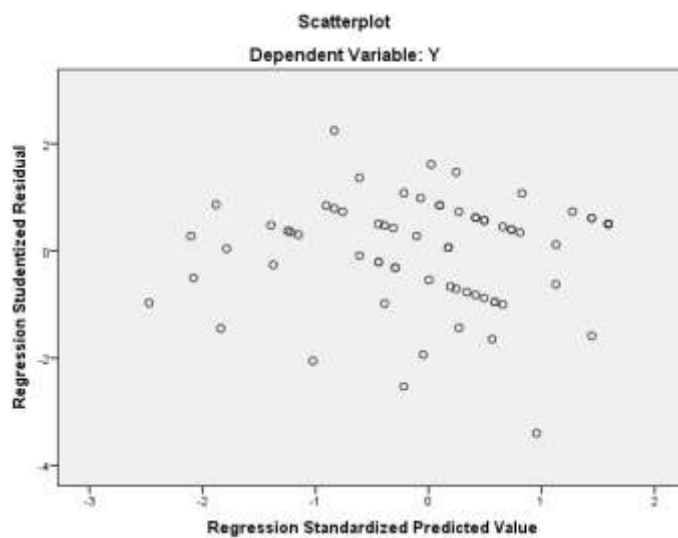
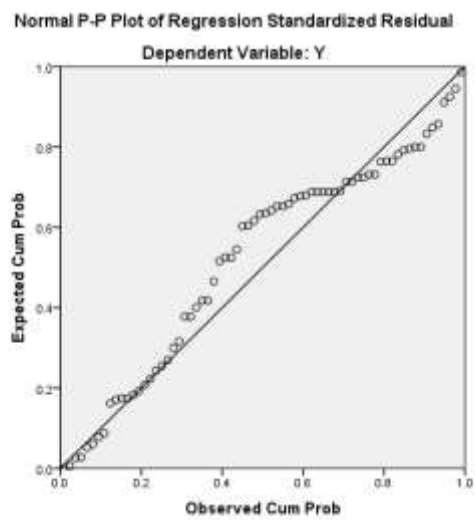
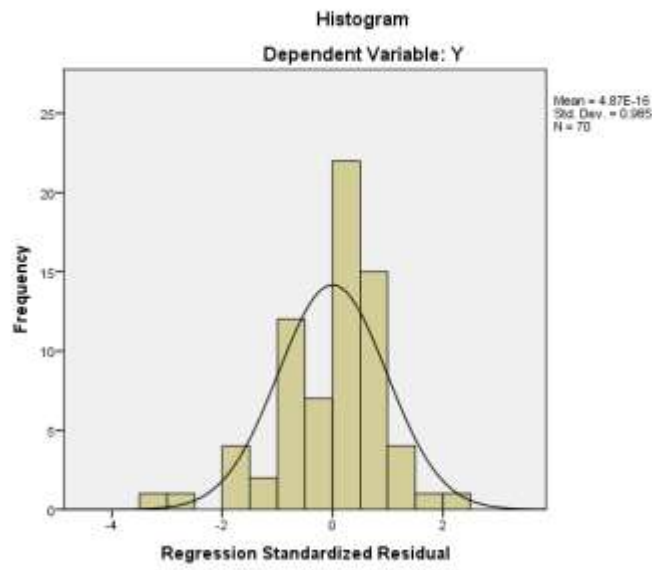
a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.4234	4.7707	4.2433	.33163	70
Std. Predicted Value	-2.472	1.590	.000	1.000	70
Standard Error of Predicted Value	.056	.170	.092	.029	70
Adjusted Predicted Value	3.4866	4.7596	4.2451	.32799	70
Residual	-1.56034	1.03326	.00000	.46065	70
Std. Residual	-3.338	2.210	.000	.985	70
Stud. Residual	-3.404	2.245	-.002	1.007	70
Deleted Residual	-1.62239	1.06607	-.00186	.48113	70
Stud. Deleted Residual	-3.714	2.317	-.009	1.033	70
Mahal. Distance	.012	8.162	1.971	2.022	70
Cook's Distance	.000	.180	.015	.031	70
Centered Leverage Value	.000	.118	.029	.029	70

a. Dependent Variable: Y

Charts



Lampiran 5: Uji Validitas dan Relibialitas KPK

Correlations

		KPK1	KPK2	KPK3	TOTAL
KPK1	Pearson	1	.626**	.611**	.877**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	70	70	70	70
KPK2	Pearson	.626**	1	.518**	.847**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70
KPK3	Pearson	.611**	.518**	1	.828**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	70	70	70	70
Mean	Pearson	.877**	.847**	.828**	1
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	3

Lampiran 6: Uji Validitas dan Reliabilitas PTI

Correlations

		PTI1	PTI2	PTI3	PTI4	PTI5	PTI6	Mean
PTI1	Pearson Correlation	1	.470**	.424**	.470**	.412**	.401**	.705**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
PTI2	Pearson Correlation	.470**	1	.517**	.411**	.394**	.562**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
PTI3	Pearson Correlation	.424**	.517**	1	.598**	.437**	.556**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
PTI4	Pearson Correlation	.470**	.411**	.598**	1	.443**	.504**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
PTI5	Pearson Correlation	.412**	.394**	.437**	.443**	1	.552**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
PTI6	Pearson Correlation	.401**	.562**	.556**	.504**	.552**	1	.793**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000		.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
Mean	Pearson Correlation	.705**	.755**	.784**	.755**	.712**	.793**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.845	6

Lampiran 7: Uji Validitas dan Reliabilitas PKD

Correlations

		PKD1	PKD2	PKD3	PKD4	PKD5	Mean
PKD1	Pearson Correlation	1	.676**	.462**	.498**	.409**	.785**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70
PKD2	Pearson Correlation	.676**	1	.577**	.557**	.349**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.003	.000
	N	70	70	70	70	70	70
PKD3	Pearson Correlation	.462**	.577**	1	.570**	.399**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000
	N	70	70	70	70	70	70
PKD4	Pearson Correlation	.498**	.557**	.570**	1	.415**	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70
PKD5	Pearson Correlation	.409**	.349**	.399**	.415**	1	.645**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.001	.000		.000
	N	70	70	70	70	70	70
Mean	Pearson Correlation	.785**	.823**	.796**	.800**	.645**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	70	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.829	5